Jurnal Ilmu Pemerintahan

IMPLEMENTASI UJI KIR ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN JEMBER

(Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Pada Tahun 2018)

Ahmad Subekti
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : ahmasubekti43@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan atau ImplementasiUji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan peraturan Bupati Jember No 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan SK Nomor : 551/623/322/2017 tentang penetapan Visi, Misi, dan Motto UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Metode penelitian menggunakan pendekatan kulitatif. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan ialah Purposive Samplingyaitu sampel diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah dataprimer dan data sekunder.Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori berdasarkan pendapat Edwads III (1980:10) bahwa implementasi yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian atau temuan data baik data primer maupun data sekunder, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik dan maksimal, dan kendala yang sering terjadi di sebabkan kurangya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan administrasi khususnya masyarakat yang baru pertama kali melakukan proses pengujian kendaraan di UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Ujikir.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi transportasi merupakan sarana penunjang dalam pembangunan suatu negara, transportasi juga harus memiliki standar keselamatan

dalam hal ini penyedia transportasi umum wajib melakukan tes uji KIR pada kendaraannya. Uji KIR dalam kamus besarBahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti melakukan pengecekan kendaraan, KIR sendiri bukanlah singkatan melainkan sebuah kata yang memiliki arti, dan pada Dinas Perhubungan KIR merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor seperti truk, pickup, angkot, bus dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Oleh karena itu pada Dinas Perhubungan melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan mengelurakan izin layak operasi, sehingga dapat meminilmalkan terjadinya kecelakaan akibat kendaraan bermotor yang tidak layak beroprasi tetapi masih beroperasi.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor lain. Dalam memperoleh sertifikat izin KIR bukan perkara mudah, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan seperti KTP, BPKB, STNK, NPWP , dan memiliki izin trayek untuk angkutan tertentu. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (safety) dan pencemaran (pollution). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor.

Di Kabupaten Jember Transportasi menjadi hal penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di wilayah kampus, angkutan umum menjadi hal penting dalam memperlancar segala urusan setiap masyarakat jember. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No 39 tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember , selanjutnya diatur pada peraturan perbup kabupaten jember pada bagian kesatu ayat (3) pada point (g) yang berbunyi : pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor , bandara, terminal tipe c.

Kebijakan uji berkala kendaraan bermotor secara hukum diatur dalam peraturan Menteri Nomor PM 33 Tahun 2018 Pasal 1di mana dalam peraturan

Menteri mengatur Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jember Nomor : 625 Tahun 2017 Tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Surat Keputusan Nomor : 551/623/322/2017 tentang Penetapan Visi, Misi dan Motto UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab. Jember.

Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap sebuah kebijakan publik uji berkala kendaraan bermotor perlu mendapat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pentingnya standar keselamatan dalam perlindungan konsumen transportasi baik angkutan orang maupun angkutan barang mewajibkan para penyedia transportasi untuk melakukan uji KIR terhadap kendaraannya.

Landasan Teori

Implementasi Kebjakan

Menurut George Edward**, EdwardIII**Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam faktor – faktor tersebut perlu mengetahui bagaimana pengaruh terhadap suatu implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Maka dalam hal ini Edward dapat menjawab ke dua pertanyan tersebut dengan mengkaji dua faktor atau variabel dalam merumuskan kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi.

Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2008:5-6) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan November – Desember 2018. Sumber data diperoleh dari UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember. Penentuan informan dilakukan dengan cara metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis menurutMiles dan Huberman (1992:15-19)yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember

UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember Jln. Dewi Sartika, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember, merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan serangkain kegiatan menguji dan/atau

memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan untuk daerah Kabuaten Jember, Jawa Timur.

2. Implementasi Uji Kir angkutan umum di Kabupaten Jember

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Implentasi Uji Kir angkutan umum di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada dan arahan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dengan didukungnya fasilitas yang memadai dan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur dan partisipasi yang positif dari masyarakat atau pemilik kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan taat dan tertib dalam pemenuhan persyaratan selama proses pengujian kendaraan berlangsung.Untuk menjawab apakah Implementasi Uji Kir angkutan umum di Kabupaten Jember telah dijalankan dengan tepat berdasarkan pendapat Edwads III (1980:10) dengan mempertimbangkan empat faktor berikut ?

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasikebijakan.Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah SOP dan Fragmentasi.

1. Standar Operating Procedure (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasar nya (Budi Winarno:2008:177). Standard Operating Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dalam keputusan kepala Dinas Kabupaten Jember nomor : 625 Tahun 2017 tentang standart operasional prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor menyebutkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyrakat khususnya pelayanan dibidang pengujian kendaraan bermotor agar transparasi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya diperlukan standart operasional prosedur pelayanan pengujian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

2. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno (2008 : 209) adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan factor yang penting dalam terselenggaranya kebijakan dengan baik, dengan itu diperlukannya sumberdaya baik dan sesuai dengan keahliannya dalam melaksanakan kebijakan. Kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan yaitu sering terjadi di sebabkan oleh staf yang tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak memadai. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang.

c. Disposisi

Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa UPTD.Pengujian Kendaraan Bemotor Kabupaten Jember terdapat bidang-bidang dan bagian masing-masing yang melakukan tugas atau proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor di mulai dari *Custumer service*, *Drive Thru*, Ruang Uji Kendaraan, Ruang hasil uji dimana di setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing dalam setiap pelayanan nya sesuai dengan SOP UPTD.Pengujian kendaraan bermotor.

d. Komunikasi

Didalam proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, komunikasi menjadi hal yang penting dalam sebuah proses pelayanan di karenakan masih banyak nya masyarakat yang belum paham tentang persyaratan apa saja yang di perlukan dalam administrasi pengujian kendaraan bermotor, oleh karena itu pentingnya komunikasi dan sosialisai berupa penyampaian informasi kepada masyarakat terutama bagi yang baru pertama kali melakukan pengujian kendaraan bermotor, perlu selalu di laksanakan karena tanpa komunikasi yang baik akan memperlambat proses pelayanan pengujian kendaraan karena kurang nya persyaratan yang dibawa oleh pemilik kendaraan. Pihak UPTD.Pengujian kendaraan bermotor sendiri melakukan penyampain informasi salah satunya dengan membagikan brosur kepada masyarakat seperti SOSIALISASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR OVER DIMENSI OVER LOADING (ODOL) dengan tujuan memberikan informasi kepada pemilik kendaraan supaya memperhatikan panjang dimensi kendaraan agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Kesimpulan

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, dan ada 4 faktor dalam kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur birokrasi di UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kab.Jember telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku, dan pembagian tugas dan wewenang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jabatan masing-masing tidak ada tumpang tindih sesuai dengan struktur organisasi yang ada di upt.
2. Sumber daya manusia yang tersedia di UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember telah memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan keahlian di bidang masing masing, dan sumber daya alat juga telah memenuhi standar yang berlaku dan siap untuk digunakan.
3. Komunikasi yang dilakukan di UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember salah satu nya dengan pembagian brosur terkait program-program baru

yang akan dilakukan guna mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan uji kir.

4. Disposisi di UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember telah melaksanakan tugas dan pelayanan sesuai dibidang masing-masing dan kerja sama yang baik selalu dilakukan oleh petugas demi memperlancar kinerja pelayanan dan mencegah terjadinya keterlambatan pada pelayanan uji kir.

Saran

Dalam menanggapi masalah yang ada pada pelayanan administrasi penyampaian informasi dan sosialisasi perlu di tingkatkan, dikhususkan bagi masyarakat yang belum pernah melakukan pengujian kendaraan atau pun yang baru melakukan,di karenakan setiap proses pelayanan mempunyai persyaratan sendri-sendri tergantung jenis kendaraan dan masalahnya. Upaya UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor dalam sosialisasi pembagian brosur kepada masyarakat terkait program "ODOL" merupakan upayang yang sangat bagus.

Namun kepada pemilik kendaraan bermotor hendaknya menyadari akan bahayanya kecelakaan, untuk itu pemilik kendaraan disarankan untuk selalu tepat waktu membawa kendaraanya untuk melakukan pengujian berkala, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan karena salah satu factor penyebab kecelakaan adalah menyangkut teknis kendaraan bermotor tersebut, dan selain itu juga pemilik kendaraan akan tau diaman komponen kendaraan yang harus diperbaiki, diganti atau sudah tidak layak digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Edward III, Gorge C. 1980. *Implementing Public Policy.* Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung:Penerbit AIPI

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik.* Bandung : Penerbit AIPI

Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi.* Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara

Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara

Darise, Nurlan. 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah,* PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Penerbit CV Alfabeta

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang : UMM Press.

Undang-undang :

Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Surat Keputusan Nomor: 551/623/322/2017 Tentang Penetapan Visi, Misi Dan Motto UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab.Jember

SOP Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jember Nomor : 625 Tahun 2017 Tentang Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jurnal :

Sri Ambar Wati, Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor Di UPT.Dinas Perhubungan Kota Samarinda (2017), diakses 8 Oktober 2018

https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL%20(02-24-17-06-44-44)

Haslinda, Efektivitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Studi Pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kendari (2018), diakses 9 Oktober 2018

http://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/download/9/3013

Rosi Damayanti, Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang, Studi Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar (2012), diakses 7 Oktober 2018

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/30693/Pelaksanaan-Pengujian-Kendaraan-Bermotor-Terkait-Dengan-Keselamatan-Penumpang-Studi-Di-Dinas-Perhubungan-Komunikasi-Dan-Informatika-Kabupaten-Karanganyar